



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**2023
EDITION**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Created By.
Bagian Perencanaan & Keuangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 dapat diselesaikan.

LKjIP ini merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemberi wewenang dan mandate untuk menjalankan kegiatan dan penggunaan anggaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Paser sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Paser termasuk peran Sekretariat Daerah dan dukungan serta partisipasi masyarakat dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikan sumbangsinya untuk kemajuan Kabupaten Paser.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Tana Paser, Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH



Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661211 198609 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Maksud dan Tujuan Laporan	
A.1. Maksud Laporan	5
A.2. Tujuan Laporan	5
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	5
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8
D. Isu Strategis	9
E. Sistematika Penyajian	9
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Indikator Kinerja Utama	11
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	
A.1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023	19
A.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	24
B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran	28
C. Realisasi Anggaran	38
D. Analisa Efisiensi	46
E. Tindak Lanjut atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2022	46
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran – Saran	49
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Kabupaten Paser.

Analisa dan bukti - bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2022 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, untuk sumber data yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja menggunakan Sasaran yang terdapat pada Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2023 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2022 – 2026.

Analisa terhadap sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Berhasil** dengan nilai rata – rata **108,25 %**.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Paser yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Paser, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Paser. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Paser.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser adalah:

1) Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2) Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

1. penyusunan perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan, kelembagaan, tatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah;
6. pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
7. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi :

1. *Bagian Tata Pemerintahan*
2. *Bagian Kesejahteraan Rakyat*
3. *Bagian Hukum*
4. *Bagian Kerja Sama*

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi :

1. *Bagian Perekonomian*
2. *Bagian Administrasi Pembangunan*
3. *Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
4. *Bagian Sumber Daya Alam*

d. Asisten Administrasi Umum yang membawahi :

1. *Bagian Umum*
2. *Bagian Organisasi*
3. *Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
4. *Bagian Perencanaan dan Keuangan*

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN PASERP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASERP

ANDI AZIS
 NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAMI FADLI

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan *perumusan perencanaan yang berkualitas*. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Paser yang membantu Kepala Daerah menjalankan tugas dan fungsinya dalam *Penunjang Urusan Pemerintahan*.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, dan akar masalah, serta hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel I

Tabel Permasalahan

No.	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Belum Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<i>Ketidak jelasan kewenangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih antara Dinas, Badan, Bagian dan ketersediaan sumber daya aparatur. Dalam konteks ini area kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan yang sifatnya makro dan perumusan kebijakan teknis menjadi tidak jelas.</i>
2	Belum Tercapainya Pelayanan Yang Berkualitas dan Profesional.	<i>Kurangnya Pembinaan dan Pengembangan atau ketersediaan sumber daya aparatur serta Pelayanan yang belum memahami SOP akan menghasilkan kerja yang kurang baik secara vertikal maupun horizontal, dan kurang mampuan pejabat tertentu dalam menyelesaikan permasalahan / tugas, yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga pimpinan memberikan tugas tersebut kepada pejabat lain yang</i>

		<i>dianggap mampu meskipun bukan tugas pokok dan fungsinya.</i>
--	--	-----------------------------------------------------------------

Sumber : RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2022-2026

D. ISU STRATEGIS

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai PD yang mempunyai tugas pokok *melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu strategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*UNRESOLVED MATTERS*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD (Focus Grup Discussion) atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser **adalah *Belum Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Belum Tercapainya Pelayanan Yang Berkualitas dan Profesional.***

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Menjelaskan Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Perumusan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Berdasarkan Urusan dan Program yang diampu,

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mendukung pencapaian misi Kabupaten Paser yang tercantum pada RPJMD yaitu Misi kedua ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.*** Tujuan dari misi kedua tersebut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam misi tersebut ***Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik*** diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;
2. Meningkatkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;
5. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebanyak 3 (*Tiga*) indikator.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Setda Kabupaten Paser

No.	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	0	0	0	0	0	0
2	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	85	85	90	90	95	100

3	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	80	80	85	90	95	100
---	----------------------------------------------------------------------------------	----	----	----	----	----	-----

Tabel 2.2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Berorientasi Hasil Yang Efektif dan Efisien	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	Temuan Administratif atau penatausahaan yang tidak sesuai dengan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	0 = 100%	Renja Sekretariat Daerah 2023
2.	Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat yang akuntabel	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terasilitasi	Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terasilitasi pada bagian yang mengampu indikator	$(\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$	Renja Sekretariat Daerah 2023
3.	Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	Tingkat Penerapan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif pada bagian yang mengampu indikator	$(\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$	Renja Sekretariat Daerah 2023

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 - 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023. Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah menetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2023 meliputi 3 (tiga) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran beserta targetnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Berorientasi Hasil Yang Efektif dan Efisien	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	0
2	Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat yang akuntabel	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	85 %
3	Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	80 %

Tabel 2.4

No	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.268.380.554,00
		2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.030.553.874,00
		3	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.024.144.900,00
		4	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.064.638.383,00
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5	Penataan Organisasi	1.728.851.619,00
		6	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.376.346.758,00
		7	Administrasi Barang Milik Daerah	0,00
		8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.355.000,00
		9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.235.905.005,00
		10	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.846.800,00

		11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.731.554.200,00
		12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.348.441.500,00
		13	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	331.355.980,00
		14	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.305.171.000,00
		15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.616.432.047,00
		16	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.747.181.830,00
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17	Fasilitas Kerjasama Daerah	465.460.429,00
		18	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	26.971.652.200,00
		19	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	2.385.090.571,00
		20	Administrasi Tata Pemerintahan	3.730.212.603,00
TOTAL				145.373.575.253,00

**Tabel 2.5
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Berorientasi Hasil Yang Efektif dan Efisien	1. Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	Jumlah	0	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	i. Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	Nilai	72	106.433.441.739	Asisten Administrasi Umum
					1. Penataan Organisasi	1. Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	Persen	100	1.728.851.619	Kepala Bagian Organisasi
					2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2. Persentase tertib pengelolaan barang milik daerah lingkup sekretariat daerah	Persen	100	0	Kepala Bagian Umum
					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3. Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	100	212.355.000	Kepala Bagian Umum
					4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	4. Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	20.235.905.005	Kepala Bagian Umum
					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	5. Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	Persen	100	799.846.800	Kepala Bagian Umum
					6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	33.731.554.200	Kepala Bagian Umum
					7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	8.348.441.500	Kepala Bagian Umum
					8. Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	8. Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	Persen	100	3.305.171.000	Kepala Bagian Umum
					9. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9. Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	5.376.346.758	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					10. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	10. Perencanaan, Jumlah Penganggaran, dan	Persen	100	331.355.980	Kepala Bagian Perencanaan &

						Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Keuangan
						11. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	30.616.432.047	Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan
						12. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12.	Persen	100	1.747.181.830	Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan
2.	Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat yang akuntabel	2.	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	Persen	85	a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	i. Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti ii. Nilai LPPD	Persen Nilai	100 2,75	33.552.415.803	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
						1. Administrasi Tata Pemerintahan	1. Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	Persen	100	3.730.212.603	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
						2. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2. Persentase Koordinasi Hukum yang terfasilitasi	Persen	100	2.385.090.571	Kepala Bagian Hukum
						3. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3. Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam Menyusun kebijakan	Persen	100	26.971.652.200	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
						4. Fasilitasi Kerjasama Daerah	4. Cakupan Kerjasama Daerah	Persen	100	465.460.429	Kepala Bagian Kerjasama
3.	Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien	3.	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	Persen	80	a. Program Perekonomian dan Pembangunan	i. Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100	5.387.717.711	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
						1. Pengelolaan Barang dan Jasa	1. Persentase hasil proses PBJ	Persen	100	2.064.638.383	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
						2. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	2. Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	Persen	100	1.268.380.554	Kepala Bagian Perekonomian
						3. Pelaksana Administrasi Pembangunan	3. Persentase SKPD tertib dalam Administrasi Pembangunan	Persen	100	1.024.144.900	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

					4.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber daya Alam	Persen	100	1.030.553.874	Kepala Bagian Sumber daya Alam
--	--	--	--	--	----	---------------------------------------	----	--------------------------------------------------	--------	-----	---------------	--------------------------------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2023

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukurannya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 100\%$	Berhasil	Hijau
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil	Kuning

4	<40%	Tidak Berhasil	Merah
---	------	----------------	-------

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh *Sekretariat Daerah Kabupaten Paser* dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2023			
1	2		4	5	6	7	8
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Berorientasi Hasil Yang Efektif dan Efisien	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	Tindak lanjut Rekomendasi APIP TA.2022 yang telah diselesaikan di TA. 2023	Jumlah	0	0	100	Berhasil
Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat yang akuntabel	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	Persentase Capaian Kinerja yang dilaksanakan pada Program Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	85	103,55	121,82	Berhasil
Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	Jumlah Kebijakan yang disahkan Pada TA.2022 yang telah diterapkan di TA. 2023	%	80	82,35	102,94	Berhasil
RATA-RATA PENCAPAIAN IKU						108,25	Berhasil

Adapun pengukuran indikator ***Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP*** adalah Tindak lanjut Rekomendasi APIP TA. 2022 yang telah diselesaikan di TA. 2023, untuk indikator ***Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi*** diukur dengan Capaian Kinerja yang dilaksanakan pada Program Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sedangkan ***Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana secara efektif*** dilakukan pengukuran dengan Jumlah Kebijakan yang dibuat Pada TA. 2022 yang telah diterapkan di TA. 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Temuan BPK-RI dan APIP Tahun 2022 yang ditindaklanjuti di Tahun 2023

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Keterangan
1.	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Sebesar Rp.15.225.000,-	Bupati Paser agar menginstruksikan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah untuk mempertanggung jawabkan dengan cara menyetor ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas masing-masing sebesar Rp.15.225.000,00.	Bupati Paser menginstruksikan untuk mempertanggungjawabkan dengan cara menyetor ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 15.225.000,00	STS sebesar Rp. 15.225.000,- Selesai ditindaklanjuti
2.	Kelebihan Pembayaran Honorarium TIM Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan Sekretaris Daerah sebesar Rp.27.795.000,-	Bupati Paser agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk mempertanggung jawabkan dengan cara menyetor ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran Honorarium TIM Pelaksana sebesar Rp.27.795.000,-	Bupati Paser menginstruksikan untuk mempertanggungjawabkan dengan cara menyetor ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran Honorarium TIM Pelaksana Sekretaris Daerah sebesar Rp.27.795.000,-	STS sebesar Rp.27.795.000,- Selesai ditindaklanjuti

Tabel 3.4
DAFTAR KEBIJAKAN PADA INDIKATOR PERSENTASE KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI

No	Nomor	Uraian	Jenis	Keterangan
1	500/611/EK.2 Tanggal 11 Maret 2022	menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Surat Edaran Bupati	Sudah dilaksanakan
2	500/967/EK.3/VI/2022 Tanggal 2 Juni 2022	dukungan pelaksanaan sensus penduduk 2020 lanjutan	Surat Edaran Bupati	Sudah dilaksanakan

3	500/1799/EK Tanggal 6 Oktober 2022	dukungan pelaksanaan registrasi sosial ekonomi (Regsosek)	Surat Edaran Bupati	Sudah dilaksanakan
4	35 Tahun 2022 Tahun 14 November 2022	pedoman pengadaan barang / jasa badan usaha milik daerah di lingkungan pemerintah kabupaten paser	Peraturan Bupati	Sudah dilaksanakan
5	182 Tahun 2022	percepatan pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten paser	Surat Edaran Bupati	Sudah dilaksanakan
6	485 tahun 2022	Batas Waktu Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Surat Edaran Bupati	Sudah dilaksanakan
7	027/1080/BPBJ/2022	percepatan pelaksanaan pengadaan barang / jasa Tahun Anggaran 2022	Surat Edaran Bupati	Sudah dilaksanakan
8	2099 Tahun 2022	percepatan pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah Tahun Anggaran 2023 di lingkungan pemerintah kabupaten paser	Surat Edaran Bupati	Sudah dilaksanakan
9	1172 tahun 2022	Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser	Surat Edaran Bupati	Sudah dilaksanakan
10	027/KEP-434/2022	Pembentukan tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri kabupaten paser	Instruksi Bupati	Sudah dilaksanakan
11	4 Tahun 2022	Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan	Peraturan Daerah	Sudah dilaksanakan
12	-	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi	Peraturan Daerah	(Masih diprovinsi)belum dilaksanakan
13	-	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Peraturan Bupati	(masih di DPRD) belum dilaksanakan
14	-	Revisi Perbup Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan tarif retribusi Perda kabupaten paser nomor 5 tahun 2013 tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah	Peraturan Bupati	(Masih diprovinsi)belum dilaksanakan
15	524/1039/SDA.1	Pelaksanaan Kurban dan Pematangan hewan dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku (foot and mouth disease) di kabupaten paser	Surat Himbauan Bupati	Masih diterapkan pada saat pelaksanaan kurban dan pematangan hewan dengan mengikuti panduan dan tata cara pelaksanaan kegiatan kurban
16	524/972/SDA.1	Kewaspadaan dini penyakit mulut dan kuku	Surat Himbauan Bupati	Masih dilaksanakan dan berlanjut kegiatan vaksinasi PMK
17	525/911/SDA/2022	percepatan penyerapan tanda buah segar (TBS) kelapa sawit	Surat Edaran Bupati	Sudah tidak diterapkan karna mekanisme harga pasar sudah normal

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja pada Indikator Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi

Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Pagu 2023		Realisasi Target Kinerja dan Pagu TA. 2023	Tingkat Capaian Kinerja (%) 2023
Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat yang akuntabel					
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti 2. Nilai LPPD	1. 100% 2. 2,75	1. Persen 2. Nilai	1. 106,37 2. 2,77	103,55%
Bagian Tata Pemerintahan					100,00%
Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100	Persen	100%	100,00%
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	23	Dokumen	23	100,00%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9	Dokumen	9	100,00%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	Dokumen	3	100,00%
Bagian Hukum					142,16%
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100	Persen	142,16	142,16%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	760	dokumen	946	124,47%
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	Kasus	4	200,00%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100	Dokumen	102	102,00%
Bagian Kesejahteraan Rakyat					100,00%
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	100	Persen	100	100,00%
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	357	Dokumen	357	100,00%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,	100	Dokumen	100	100,00%

terkait Kesejahteraan Sosial	Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	15	Dokumen	15	100,00%
Bagian Kerjasama					100,00%
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah	100	Persen	83,33	83,33%
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30	Dokumen	25	83,33%
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30	Laporan	25	83,33%

A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2022-2026. Perbandingan Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel halaman berikutnya :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2022		2023	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	Jumlah	0	100	0	100
2.	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terasilitasi	%	94,02	110,61	103,55	121,82
3.	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	%	65	81,25	82,35	102,94
	JUMLAH			97,29		108,25

Sumber : Sasaran pada Dokumen Perjanjian Kinerja 2023.

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2023 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2022-2026. Pencapaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra 2022-2026, untuk mengetahui kemampuan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser selama 3 (tiga) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel halaman berikutnya :

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Berorientasi Hasil Yang Efektif dan Efisien	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	Tindak lanjut Rekomendasi APIP TA. Sebelumnya yang telah diselesaikan di TA. selanjutnya	Jumlah	0	0	0
Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat yang akuntabel	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	Persentase Capaian Kinerja yang dilaksanakan pada Program Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	103,55	95	100
Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	Jumlah Kebijakan yang disahkan Pada TA. sebelumnya yang telah diterapkan di TA. sebelum dan sesudahnya	%	82,35	95	95
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	Survei	Angka	76,66	80	80
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti 2. Nilai LPPD	1. Capaian Kinerja yang dilaksanakan pada Program Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. %	1. 106,37	1. 100	1. 100
		2. Nilai LPPD dari KEMENPAN-RB	2. Nilai	2. 2,77	2. 3,33	2. 3,33
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Capaian Kinerja yang dilaksanakan pada Program Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	%	114,63	100	100

Sumber : 1. Renstra 2022-2026
2. Evaluasi Renja Tahun 2023

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Hasil evaluasi capaian kinerja sesuai sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser melalui indikator kinerja, terhadap sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Berhasil** dengan nilai rata – rata **103.11%**. Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2022-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser.

Dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator sasaran strategis. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8.1.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Berorientasi Hasil Yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	Jumlah	0	0	100	0	0	100
Rata Rata Capaian Kinerja				100			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Berorientasi Hasil Yang Efektif dan Efisien**, pada tahun 2022 sebesar 100%, sedangkan untuk Capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Berorientasi Hasil Yang Efektif dan Efisien** pada tahun 2023 sebesar **100 %** dikategorikan **Berhasil**. Capaian ini disebabkan karena dalam pengukuran kinerja Tahun 2023 telah menyelesaikan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP. Adanya temuan ataupun hasil rekomendasi pada tahun 2022 telah diselesaikan pada tahun 2023, dapat dilihat bahwa tahun sebelumnya dan tahun ini mencapai hasil yang sama yaitu 100%.

Tabel 3.8.2.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat yang Akuntabel.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	%	85	94.02	110.61	85	103,55	121,82
Rata Rata Capaian Kinerja				110,61			121,83

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat yang Akuntabel**, pada tahun 2022 sebesar **110,61%** dikategorikan **Berhasil**, sedangkan untuk Capaian kinerja sasaran **Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat yang Akuntabel** pada tahun 2023 sebesar **121,83%** dikategorikan **Berhasil**, dapat dilihat bahwa perbandingan capaian tahun sebelumnya dengan tahun ini indikator sasaran melebihi target dengan mengalami peningkatan sebesar **11,22%**, hal ini disebabkan pada 4 Bagian yang mengampu indikator sasaran tersebut ada beberapa yang dapat melebihi target sasaran sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM:

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti, target 100%, Capaian 106,37%.
2. Nilai LPPD, target 2,75, Realisasi 2,77, Capaian 100,73%.

SASARAN KEGIATAN:

1. Administrasi Tata Pemerintahan, Target 100%, Capaian 100%.
2. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Target 100%, Capaian 142,16%.
3. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Target 100%, Capaian 100%.
4. Fasilitasi Kerjasama Daerah, Target 100%, Capaian 83,33.

Sehingga dengan perhitungan nilai rata-rata pada setiap indikator kinerja pada sasaran kinerja **Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat yang Akuntabel** dengan indikator *Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi* maka didapatkan hasil realisasi kinerja sebesar **103,55%**.

Tabel 3.8.3.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif dan Efisien	%	80	65	81,25	80	82,35	102,94
Rata Rata Capaian Kinerja				81,25			102,94

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien**, pada tahun 2022 sebesar **81,25%** dikategorikan **Cukup Berhasil** sedangkan untuk Capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien** pada tahun 2023 sebesar **102,94%** dikategorikan **Berhasil**, dapat dilihat bahwa pada tahun ini indikator sasaran telah melebihi target, dengan mengalami kenaikan sebesar **21,69%** hal ini disebabkan dari total Kebijakan sebanyak 17 Kebijakan pada tahun 2022 ada 14 Kebijakan yang telah dilaksanakan dan 3 Kebijakan yang belum dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga persentase realisasi kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terlaksana secara efektif sebesar 82,35%.

Perhitungan antara target dengan realisasi pada sasaran kinerja **Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien** dengan indikator *Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif* didapatkan hasil realisasi kinerja sebesar **82,35%**.

Dalam melaksanakan kegiatan terdapat factor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian pekerjaan, adapun beberapa factor penghambat dan pendukung di beberapa bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada halaman berikutnya.

Tabel 3.9
Faktor Penghambat dan Pendukung Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		HAMBATAN / MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			Penyelesaian dokumen perencanaan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Penyelesaian dokumen RKA telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen			Penyelesaian laporan capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2268 Org/Bln	2268 Org/Bln			pembayaran gaji & tunjangan secara rutin telah terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	12 Bulan			Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD telah terlaksana sesuai dengan target
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Laporan keuangan akhir tahun SKPD telah terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Org/Bulan	28 Org/Bulan			pembayaran gaji & tunjangan KDH/WKDH secara rutin telah terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Paket	8 Paket	Penyelesaian Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH beberapa ada yang belum dilaksanakan	Berkoordinasi mengenai kelengkapan atribut sehingga dapat dilaksanakan secara maksimal	

	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	1 Orang	Pelaksanaan Medical Check Up, menunggu dari permintaan dari Bupati dan Wakil Bupati untuk fasilitas Medical Check Up. (Pasif)	-Belum dapat dilaksanakan karena padatnya agenda kegiatan Bupati dan Wakil Bupati - Masih menunggu Jadwal dri Bupati dan Wakil Bupati	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Org/Bulan	12 Org/Bulan			realisasi operasional kepala daerah & wakil kepala daerah telah terlaksana sesuai dengan permintaan kebutuhan kepala daerah & wakil kepala daerah
Fasilitasi Kerja sama Daerah	Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri	30 Dokumen	25 Dokumen			Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	30 Laporan	25 Laporan			Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dilaksanakan sesuai target pada waktu yang telah ditentukan
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	35 Dokumen	35 Dokumen			Penyelesaian dokumen perencanaan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25 Dokumen	25 Dokumen			Penyelesaian dokumen perencanaan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	30 Dokumen	30 Dokumen			Penyelesaian dokumen perencanaan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	760 dokumen	946 dokumen	Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 2.936.571, tidak dapat direalisasikan karena terkendala dengan waktu pengamprahan dan tingginya volume pekerjaan penyelesaian atas rancangan produk hukum yang harus ditetapkan sebelum akhir tahun 2023	Tahun 2024, kegiatan ini akan dibagi dalam dua tahap (per semester) sehingga anggaran dapat direalisasikan, mengantisipasi adanya perubahan jadwal pengusulan rancangan dari Kanwil Kemenkumham dan Biro Hukum Sekretariat Propinsi Kaltim.	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	4 Kasus			Bahwa kasus Hukum Yang ditangani oleh Bagian Hukum Tahun 2023 ada 4 Kasus dan Sudah ada Putusan dari Pengadilan
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 Dokumen	102 Dokumen			Realisasi Kinerja Telah Melebihi Target
Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	23 Dokumen	23 Dokumen			Penyusunan rancangan kebijakan sesuai usulan Perangkat Daerah dan diselesaikan tepat waktu
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 Dokumen	9 Dokumen			Penyelesaian dokumen penataan batas daerah, batas antar kecamatan dan rupa-rupa bumi dapat terselesaikan sesuai dengan target yang sudah ditentukan
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Penyelesaian dokumen atau laporan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	12 Dokumen	12 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan

	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan			Penyelesaian laporan kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20 Dokumen	20 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	42 Laporan	42 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	20 Dokumen	20 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	25 Dokumen	25 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1705 Dokumen	2367 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan melebihi target yang ditentukan
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	245 Dokumen	580 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan melebihi target yang ditentukan
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Orang	12 Orang			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41 Dokumen	41 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	4 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan

	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	36 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	Pada Perubahan APBD 2023 tidak merubah target menjadi 0 didalam DPA Perubahan	Anggaran dialokasikan ke Kegiatan yang bersifat lebih urgent	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	165 Dokumen	155 Dokumen	Ada beberapa pegawai yang mutasi / promosi keluar dari Sekretariat Daerah	Jumlah akan ditinjau Kembali sesuai dengan jumlah pegawai	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	131 Orang	Perubahan kebijakan aturan mengenal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang akan ditinjau kembali sesuai kebutuhan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 Paket	16 Paket			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Paket	17 Paket			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25 Paket	18 Paket	Bersifat pasif dikarenakan menunggu permintaan	Pendataan peralatan rumah tangga yang akan disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	5 Paket			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30 Paket	23 Paket	Bersifat pasif dikarenakan menyesuaikan permintaan	Koordinasi pada pengguna Barang Cetak dan penyedia percetakan mengenai kebutuhan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	150 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	Pada Perubahan APBD 2023 tidak merubah target menjadi 0 didalam DPA Perubahan	Anggaran dialokasikan ke Kegiatan yang bersifat lebih urgent	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	12 Unit	12 Unit			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan	Pada Perubahan APBD 2023 tidak merubah target menjadi 0 didalam DPA Perubahan	Anggaran dialokasikan ke Kegiatan yang bersifat lebih urgent	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Laporan	15 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	20 Unit	Adanya tambahan pemeliharaan mobil Dinas Kepala Desa namun pada perubahan tidak mengubah target kinerja	Agar pada saat APBD Perubahan dapat mengingatkan kembali untuk perubahan target kinerja, bukan hanya perubahan anggaran	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	29 Unit	Adanya tambahan pemeliharaan mobil operasional namun pada perubahan tidak mengubah target kinerja	Agar pada saat APBD Perubahan dapat mengingatkan kembali untuk perubahan target kinerja, bukan hanya perubahan anggaran	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100 Persen	100 Persen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100 Persen	100 Persen			
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	100 Persen	100 Persen			

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2023 adalah sebesar **Rp.138.760.253.340,- (95,45%)** dengan Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp.145.373.575.253,-** Dengan demikian dapat dikatakan **tahun 2023** Sekretariat Daerah Kabupaten Paser ada sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) sebesar **Rp.6.613.321.913,-**

Adapun rincian realisasi anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser TA. 2023

URAIAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	TERTIMBANG (%)
BELANJA OPERASI	Rp 117.816.365.658	Rp 112.273.506.348	Rp 5.542.859.310	77,23
BELANJA PEGAWAI	Rp 30.834.849.745	Rp 29.294.726.687	Rp 1.540.123.058	20,15
BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 66.664.088.813	Rp 62.980.662.661	Rp 3.683.426.152	43,32
BELANJA HIBAH	Rp 20.317.427.100	Rp 19.998.117.000	Rp 319.310.100	13,76
BELANJA MODAL	Rp 27.557.209.595	Rp 26.486.746.992	Rp 1.070.462.603	18,22
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	Rp 27.307.504.595	Rp 26.237.145.992	Rp 1.070.358.603	18,05
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp 249.705.000	Rp 249.601.000,00	Rp 104.000	0,17
JUMLAH	Rp 145.373.575.253	Rp 138.760.253.340	Rp 6.613.321.913	95,45

Realisasi Belanja Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada table halaman berikutnya.

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	TATA PEMERINTAHAN					
	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp2.553.106.102	Rp2.551.058.407	Rp2.047.695	99,92%
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp727.681.556	Rp718.323.068	Rp9.358.488	98,71%
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp449.424.945	Rp428.477.555	Rp20.947.390	95,34%
	JUMLAH		Rp3.730.212.603	Rp3.697.859.030	Rp32.353.573	99,13%
	HUKUM					
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp556.247.135	Rp553.310.564	Rp2.936.571	99,47%
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp1.628.430.636	Rp1.492.970.080	Rp135.460.556	91,68%
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp200.412.800	Rp200.306.699	Rp106.101	99,95%
	JUMLAH		Rp2.385.090.571	Rp2.246.587.343	Rp138.503.228	94,19%
	KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp16.530.540.200	Rp16.137.023.211	Rp393.516.989	97,62%

		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp9.811.920.000	Rp9.555.029.864	Rp256.890.136	97,38%	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp629.192.000	Rp568.144.568	Rp61.047.432	90,30%	
	JUMLAH		Rp26.971.652.200	Rp26.260.197.643	Rp711.454.557	97,36%	
	KERJA SAMA						
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp232.910.029	Rp224.466.320	Rp8.443.709	96,37%	
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp232.550.400	Rp211.759.913	Rp20.790.487	91,06%	
JUMLAH		Rp465.460.429	Rp436.226.233	Rp29.234.196	93,72%		
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Rp33.552.415.803	Rp32.640.870.249	Rp911.545.554	97,28%	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PENGADAAN BARANG DAN JASA						
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp785.574.000	Rp683.038.373	Rp102.535.627	86,95%	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp874.000.000	Rp735.875.042	Rp138.124.958	84,20%	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp405.064.383	Rp351.856.005	Rp53.208.378	86,86%	
	JUMLAH		Rp2.064.638.383	Rp1.770.769.420	Rp293.868.963	85,77%	
	PEREKONOMIAN						
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp273.780.000	Rp273.700.287	Rp79.713	99,97%	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp333.526.850	Rp318.899.805	Rp14.627.045	95,61%	

		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Rp462.866.850	Rp460.367.850	Rp2.499.000	99,46%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Rp198.206.854	Rp175.677.870	Rp22.528.984	88,63%
		JUMLAH	Rp1.268.380.554	Rp1.228.645.812	Rp39.734.742	96,87%
	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp253.605.000	Rp251.104.735	Rp2.500.265	99,01%
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp297.283.700	Rp275.807.661	Rp21.476.039	92,78%
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp473.256.200	Rp451.021.679	Rp22.234.521	95,30%
		JUMLAH	Rp1.024.144.900	Rp977.934.075	Rp46.210.825	95,49%
	SUMBER DAYA ALAM					
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp398.875.874	Rp365.849.340	Rp33.026.534	91,72%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp352.172.000	Rp328.320.399	Rp23.851.601	93,23%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp279.506.000	Rp248.713.975	Rp30.792.025	88,98%
		JUMLAH	Rp1.030.553.874	Rp942.883.714	Rp87.670.160	91,49%
	JUMLAH REALISASI ANGGARAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Rp5.387.717.711	Rp4.920.233.021	Rp467.484.690	91,32%
	ORGANISASI					

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp762.604.073	Rp743.745.786	Rp18.858.287	97,53%	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp670.463.673	Rp514.399.975	Rp156.063.698	76,72%	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp125.200.000	Rp121.946.600	Rp3.253.400	97,40%	
		Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Rp36.614.300	Rp31.254.606	Rp5.359.694	85,36%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp133.969.573	Rp133.051.127	Rp918.446	99,31%	
	JUMLAH		Rp1.728.851.619	Rp1.544.398.094	Rp184.453.525	89,33%	
	UMUM						
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	Rp0	0,00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp150.075.000	Rp145.121.000	Rp4.954.000	96,70%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp62.280.000	Rp44.553.300	Rp17.726.700	71,54%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp137.472.480	Rp115.363.100	Rp22.109.380	83,92%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp6.242.232.000	Rp6.012.615.280	Rp229.616.720	96,32%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp359.785.000	Rp343.146.552	Rp16.638.448	95,38%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp453.422.375	Rp424.350.550	Rp29.071.825	93,59%	

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp47.008.000	Rp43.999.800	Rp3.008.200	93,60%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp8.353.483.401	Rp8.033.016.753	Rp320.466.648	96,16%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp4.642.501.749	Rp4.489.719.974	Rp152.781.775	96,71%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Rp799.846.800	Rp777.220.400	Rp22.626.400	97,17%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp2.392.876.000	Rp2.376.679.033	Rp16.196.967	99,32%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp23.816.283.200	Rp22.738.351.375	Rp1.077.931.825	95,47%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp7.522.395.000	Rp7.459.758.000	Rp62.637.000	99,17%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp734.460.000	Rp708.167.249	Rp26.292.751	96,42%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.554.155.000	Rp1.473.197.846	Rp80.957.154	94,79%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp6.059.826.500	Rp5.829.565.195	Rp230.261.305	96,20%

	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp1.664.620.000	Rp1.407.539.901	Rp257.080.099	84,56%
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp1.277.981.000	Rp1.134.264.490	Rp143.716.510	88,75%
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp362.570.000	Rp348.447.915	Rp14.122.085	96,11%
JUMLAH		Rp66.633.273.505	Rp63.905.077.713	Rp2.728.195.792	95,91%	
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Rp2.408.976.300	Rp2.191.422.705	Rp217.553.595	90,97%
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp967.926.058	Rp964.313.025	Rp3.613.033	99,63%
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp1.999.444.400	Rp1.981.587.628	Rp17.856.772	99,11%
JUMLAH		Rp5.376.346.758	Rp5.137.323.358	Rp239.023.400	95,55%	
PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp199.916.480	Rp195.415.396	Rp4.501.084	97,75%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp65.471.500	Rp61.253.900	Rp4.217.600	93,56%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp65.968.000	Rp65.575.039	Rp392.961	99,40%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp29.700.739.495	Rp28.270.562.246	Rp1.430.177.249	95,18%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp897.267.552	Rp871.224.241	Rp26.043.311	97,10%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp18.425.000	Rp18.421.000	Rp4.000	99,98%

	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp242.440.250	Rp167.066.441	Rp75.373.809	68,91%
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp702.631.580	Rp350.786.000	Rp351.845.580	49,92%
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp200.900.000	Rp11.026.642	Rp189.873.358	5,49%
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp601.210.000	Rp601.020.000	Rp190.000	99,97%
	JUMLAH		Rp32.694.969.857	Rp30.612.350.905	Rp2.082.618.952	93,63%
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp106.433.441.739	Rp101.199.150.070	Rp5.234.291.669	95,08%	
TOTAL KESELURUHAN		Rp145.373.575.253	Rp138.760.253.340	Rp6.613.321.913	95,45%	

D. ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya **mencapai atau lebih dari 100%**. Terlihat bahwa mayoritas dari 3 (tiga) sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 3 (tiga) sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran **Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang akuntabel**, telah mencapai kinerja sebanyak **121,82%** namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak **97,28%** dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran **Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien**, telah mencapai kinerja sebanyak **102,94%** namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak **91,32%**. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.12
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Berorientasi Hasil Yang Efektif dan Efisien	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	100	95,08	4,92
2.	Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat yang akuntabel	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terasilitasi	121,82	97,28	24,54
3.	Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	102,94	91,32	11,62

E. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

E.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Paser terhadap Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 memperoleh nilai **70,32** dengan

interpretasi predikat **Sangat Baik (BB)**, maka pada tahun 2023 direkomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Paser hal-hal sebagai berikut :

1. melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen rencana aksi dengan realisasi berupa informasi kinerja outcome ;
2. Memasukan perbandingan capaian kinerja tahun evaluasi dengan capaian Renstra di Bab III LKjIP.
3. Memasukan Tindak Lanjut evaluasi LKjIP Tahun sebelumnya di Bab III.

E.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Telah dilakukan perbaikan Rencana Aksi tahun 2023 namun belum ada informasi lebih lanjut dari Inspektorat mengenai hasil dari rencana aksi tahun 2023.
2. Telah dimasukan *perbandingan capaian kinerja dengan capaian renstra* di BAB III LKjIP Tahun 2023.
3. Telah dimasukan *tindak lanjut atas evaluasi laporan kinerja tahun sebelumnya* di BAB III LKjIP Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2022-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser, untuk sumber data yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja menggunakan Sasaran yang terdapat pada Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2023 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2022 – 2026.

Dari hasil analisis capaian kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada tahun 2023 terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis berada pada kategori **Berhasil dengan** nilai rata – rata **108,25%**.
2. Capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Berorientasi Hasil Yang Efektif dan Efisien** pada tahun 2023 sebesar **100 %** dikategorikan **Berhasil**. Capaian ini disebabkan karena dalam pengukuran kinerja Tahun 2023 telah menyelesaikan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP.
3. Capaian kinerja sasaran **Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat yang Akuntabel** pada tahun 2023 sebesar **121,83%** dikategorikan **Berhasil**, hal ini disebabkan karena pada 4 Bagian yang mengampu indikator sasaran tersebut ada beberapa yang dapat melebihi target, terlebih dalam penilaian LPPD Kabupaten Paser dapat melebihi target yang ditentukan yaitu **2,75** dengan perolehan nilai sebesar **2,77**.
4. Capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien** pada tahun 2023 sebesar **102,94%** dikategorikan **Berhasil**, hal ini disebabkan dari total Kebijakan sebanyak 17 Kebijakan pada tahun 2022 ada 14 Kebijakan yang telah dilaksanakan dan 3 Kebijakan yang belum dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga dapat melebihi target yang ditetapkan yaitu 80% dengan realisasi sebesar 82,35%.
5. Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2023 adalah sebesar **Rp.138.760.253.340,- (95,45%)** dengan Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp.145.373.575.253,-** Dengan demikian dapat dikatakan **tahun 2023** Sekretariat Daerah Kabupaten Paser ada sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) sebesar **Rp.6.613.321.913,-**. Adanya Silpa ini disebabkan karena

penambahan alokasi anggaran untuk beberapa Sub Kegiatan dilaksanakan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat capaian realisasi Program dan Kegiatan, namun demikian secara umum Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mengacu pada hasil pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka disampaikan beberapa saran dan langkah sebagai berikut:

1. Hendaknya tersedia alokasi anggaran yang memadai sesuai kebutuhan sehingga seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal.
2. Hendaknya dapat ditingkatkan fungsi koordinasi lintas Perangkat Daerah sehingga Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal
3. Hendaknya dilakukan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

Laporan Realisasi 2023 Sekretariat Daerah

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023		Realisasi Per Triwulan TA.2023				Realisasi Per Triwulan TA.2023				Target Kinerja dan Pagu TA 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%)		
				TW I		TW II		TW III		TW IV						
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sekretariat Daerah				Rp145.373.575.253		Rp13.826.587.278		Rp32.854.427.415		Rp23.988.342.367		Rp68.090.896.280	100,75%	Rp138.760.253.340	100,75%	95,45%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	Persen	Rp 5.387.717.711		Rp 477.553.710		Rp 377.512.369		Rp 742.356.181		Rp 3.322.810.761	114,63%	Rp 4.920.233.021	114,63%	91,32%
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ	100	Persen	Rp 2.064.638.383		Rp 163.808.436		Rp 153.140.610		Rp 277.018.277		Rp 1.176.802.097	158,52%	Rp 1.770.769.420	158,52%	85,77%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1705	Dokumen	Rp 785.574.000	226	Rp 104.322.556	855	Rp 57.254.910	817	Rp 124.562.953	469	Rp 396.897.954	2367	Rp 683.038.373	138,83%	86,95%
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	245	Dokumen	Rp 874.000.000	125	Rp 38.024.500	104	Rp 77.485.700	282	Rp 113.271.200	69	Rp 507.093.642	580	Rp 735.875.042	236,73%	84,20%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	Orang	Rp 405.064.383	2	Rp 21.461.380	2	Rp 18.400.000	7	Rp 39.184.124	1	Rp 272.810.501	12	Rp 351.856.005	100,00%	86,86%
Bagian Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	100	Persen	Rp 1.268.380.554		Rp 97.510.347		Rp 51.425.408		Rp 81.954.060		Rp 997.755.997	100,00%	Rp 1.228.645.812	100,00%	96,87%
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20	Dokumen	Rp 273.780.000	5	Rp 22.379.587	5	Rp 15.556.700	5	Rp 15.298.800	5	Rp 220.465.200	20	Rp 273.700.287	100,00%	99,97%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	42	Laporan	Rp 333.526.850	11	Rp 50.366.760	2	Rp 1.365.000	20	Rp 10.495.000	9	Rp 256.673.045	42	Rp 318.899.805	100,00%	95,61%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	20	Dokumen	Rp 462.866.850	5	Rp 10.150.000	4	Rp 14.700.000	6	Rp 37.291.193	5	Rp 398.226.657	20	Rp 460.367.850	100,00%	99,46%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	25	Dokumen	Rp 198.206.854	5	Rp 14.614.000	6	Rp 19.803.708	9	Rp 18.869.067	5	Rp 122.391.095	25	Rp 175.677.870	100,00%	88,63%
Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD terb dalam Administrasi Pembangunan	100	Persen	Rp 1.024.144.900		Rp 146.939.939		Rp 78.786.766		Rp 205.559.180		Rp 546.648.190	100,00%	Rp 977.934.075	100,00%	95,49%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12	Dokumen	Rp 253.605.000	3	Rp 56.688.397	3	Rp 28.997.002	3	Rp 50.866.105	3	Rp 114.553.231	12	Rp 251.104.735	100,00%	99,01%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	Laporan	Rp 297.283.700	3	Rp 37.909.685	3	Rp 24.347.702	3	Rp 86.735.025	3	Rp 126.815.249	12	Rp 275.807.661	100,00%	92,78%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan	Rp 473.256.200	3	Rp 52.341.857	3	Rp 25.442.062	3	Rp 67.958.050	3	Rp 305.279.710	12	Rp 451.021.679	100,00%	95,30%
Bagian Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100	Persen	Rp 1.030.553.874		Rp 69.294.988		Rp 94.159.585		Rp 177.824.664		Rp 601.604.477	100,00%	Rp 942.883.714	100,00%	91,49%
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	35	Dokumen	Rp 398.875.874	6	Rp 27.608.000	8	Rp 62.585.144	8	Rp 105.054.612	13	Rp 170.601.584	35	Rp 365.849.340	100,00%	91,72%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	25	Dokumen	Rp 352.172.000	2	Rp 22.836.000	4	Rp 19.044.782	9	Rp 44.492.152	10	Rp 241.947.465	25	Rp 328.320.399	100,00%	93,23%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	30	Dokumen	Rp 279.506.000	3	Rp 18.850.988	3	Rp 12.529.659	12	Rp 28.277.900	12	Rp 189.055.428	30	Rp 248.713.975	100,00%	88,98%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjut 2. Nilai LPPD	100	Persen	Rp 33.552.415.803	Rp 4.480.362.886	Rp 8.208.076.939	Rp 5.446.401.448	Rp14.506.028.976	1.106,37% 2.2,77	Rp 32.640.870.249	103,55%	97,28%				
Bagian Tata Pemerintahan		2,75	Nilai	Rp 3.730.212.603	Rp 263.483.820	Rp 194.465.238	Rp 525.978.640	Rp 2.713.931.332	100,00%	Rp 3.697.859.030	100,00%	99,13%				
Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100	Persen	Rp 3.730.212.603	Rp 263.483.820	Rp 194.465.238	Rp 525.978.640	Rp 2.713.931.332	100,00%	Rp 3.697.859.030	100,00%	99,13%				
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	23	Dokumen	Rp 2.553.106.102	2	Rp 60.347.800	3	Rp 28.812.500	6	Rp 289.540.800	12	Rp 2.172.357.307	23	Rp 2.551.058.407	100,00%	99,92%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9	Dokumen	Rp 727.681.556	2	Rp 103.586.160	4	Rp 106.794.338	2	Rp 181.677.000	1	Rp 326.265.570	9	Rp 718.323.068	100,00%	98,71%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	Dokumen	Rp 449.424.945	3	Rp 99.549.860	0	Rp 58.858.400	0	Rp 54.760.840	0	Rp 215.308.455	3	Rp 428.477.555	100,00%	95,34%
Bagian Hukum				Rp 2.385.090.571	Rp 136.688.566	Rp 254.914.751	Rp 327.579.602	Rp 1.527.404.424	142,16%	Rp 2.246.587.343	142,16%	94,19%				
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang terfasilitasi	100	Persen	Rp 2.385.090.571	Rp 136.688.566	Rp 254.914.751	Rp 327.579.602	Rp 1.527.404.424	142,16%	Rp 2.246.587.343	142,16%	94,19%				
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	760	dokumen	Rp 556.247.135	218	Rp 55.264.463	186	Rp 56.159.250	241	Rp 40.386.957	301	Rp 401.499.894	946	Rp 553.310.564	124,47%	99,47%
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	2	Kasus	Rp 1.628.430.636	0	Rp 46.704.603	1	Rp 174.944.701	3	Rp 233.565.031	0	Rp 1.037.755.745	4	Rp 1.492.970.080	200,00%	91,68%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100	Dokumen	Rp 200.412.800	1	Rp 34.719.500	49	Rp 23.810.800	24	Rp 53.627.614	28	Rp 88.148.785	102	Rp 200.306.699	102,00%	99,95%
Bagian Kesejahteraan Rakyat				Rp 26.971.652.200	Rp 4.032.234.300	Rp 7.715.313.000	Rp 4.473.353.306	Rp10.039.297.037	100,00%	Rp 26.260.197.643	100,00%	97,36%				
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	100	Persen	Rp 26.971.652.200	Rp 4.032.234.300	Rp 7.715.313.000	Rp 4.473.353.306	Rp10.039.297.037	100,00%	Rp 26.260.197.643	100,00%	97,36%				
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	357	Dokumen	Rp 16.530.540.200	44	Rp 3.916.854.000	101	Rp 6.097.600.500	133	Rp 1.744.575.300	79	Rp 4.377.993.411	357	Rp 16.137.023.211	100,00%	97,62%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100	Dokumen	Rp 9.811.920.000	3	Rp 17.874.000	50	Rp 1.538.649.300	23	Rp 2.580.039.206	24	Rp 5.418.467.358	100	Rp 9.555.029.864	100,00%	97,38%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Translumbin Limas	15	Dokumen	Rp 629.192.000	2	Rp 97.506.300	3	Rp 79.063.200	4	Rp 148.738.800	6	Rp 242.836.268	15	Rp 568.144.568	100,00%	90,30%
Bagian Kerjasama				Rp 465.460.429	Rp 47.956.200	Rp 43.383.950	Rp 119.489.900	Rp 225.396.183	83,33%	Rp 436.226.233	83,33%	93,72%				
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah	100	Persen	Rp 465.460.429	Rp 47.956.200	Rp 43.383.950	Rp 119.489.900	Rp 225.396.183	83,33%	Rp 436.226.233	83,33%	93,72%				
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30	Dokumen	Rp 232.910.029	5	Rp 28.396.000	7	Rp 22.518.800	7	Rp 62.319.400	6	Rp 111.232.120	25	Rp 224.466.320	83,33%	96,37%
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30	Laporan	Rp 232.550.400	5	Rp 19.560.200	7	Rp 20.865.150	7	Rp 57.170.500	6	Rp 114.164.063	25	Rp 211.759.913	83,33%	91,06%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UKOTA				Rp106.433.441.739	Rp 8.868.670.682	Rp24.268.838.107	Rp17.799.584.738	Rp50.262.056.543	76,66	Rp101.199.150.070	76,66	95,08%				
Bagian Organisasi				Rp 1.728.851.619	Rp 158.131.529	Rp 313.852.606	Rp 508.679.313	Rp 563.734.646	100,00%	Rp 1.544.398.094	100,00%	89,33%				
Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100	Persen	Rp 1.728.851.619	Rp 158.131.529	Rp 313.852.606	Rp 508.679.313	Rp 563.734.646	100,00%	Rp 1.544.398.094	100,00%	89,33%				
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41	Dokumen	Rp 762.604.073	31	Rp 78.530.000	5	Rp 154.265.401	5	Rp 227.588.509	0	Rp 283.361.876	41	Rp 743.745.786	100,00%	97,53%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4	Laporan	Rp 670.463.673	2	Rp 46.358.948	1	Rp 109.337.253	1	Rp 201.812.759	0	Rp 156.891.015	4	Rp 514.399.975	100,00%	76,72%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Dokumen	Rp 125.200.000	0	Rp 24.108.000	1	Rp 29.182.200	0	Rp 27.990.000	1	Rp 40.666.400	2	Rp 121.946.600	100,00%	97,40%
Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	Rp 36.614.300	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 7.459.000	1	Rp 23.795.606	1	Rp 31.254.606	100,00%	85,36%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3	Dokumen	Rp 133.969.573	0	Rp 9.134.581	2	Rp 21.067.752	0	Rp 43.829.045	1	Rp 59.019.749	3	Rp 133.051.127	100,00%	99,31%

Bagian Umum				Rp 66.633.273.505	Rp 5.215.995.165	Rp11.174.823.859	Rp 9.599.914.872	Rp37.914.343.817	93,97%	Rp 63.905.077.713	93,97%	95,91%				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	100	Persen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	0,00%				
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	0	Rp -	0,00%	0,00%				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	Persen	Rp 212.355.000	Rp 8.650.150	Rp 52.891.050	Rp 8.031.000	Rp 120.102.100	83,36%	Rp 189.674.300	83,36%	89,32%				
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	165	Dokumen	Rp 150.075.000	26	Rp 8.650.150	123	Rp 52.891.050	1	Rp 8.031.000	5	Rp 75.548.800	155	Rp 145.121.000	93,94%	96,70%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180	Orang	Rp 62.280.000	0	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	- 131	Rp 44.553.300	131	Rp 44.553.300	72,78%	71,54%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	Rp 20.235.905.005	Rp 2.130.861.718	Rp 4.765.297.000	Rp 2.148.573.088	Rp10.417.480.203	81,08%	Rp 19.462.212.009	81,08%	96,18%				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	Rp 137.472.480	4	Rp 15.195.900	9	Rp 19.964.200	1	Rp 23.110.200	2	Rp 57.092.800	16	Rp 115.363.100	100,00%	83,92%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	Paket	Rp 6.242.232.000	5	Rp 478.727.760	6	Rp 2.150.972.320	2	Rp 185.203.500	4	Rp 3.197.711.700	17	Rp 6.012.615.280	100,00%	96,32%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	Rp 359.785.000	0	Rp - 7	Rp 71.747.498	1	Rp 40.047.600	10	Rp 231.351.454	18	Rp 343.146.552	72,00%	95,38%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	Rp 453.422.375	0	Rp 4.600.000	2	Rp 130.030.250	1	Rp 129.049.800	2	Rp 160.670.500	5	Rp 424.350.550	100,00%	93,59%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30	Paket	Rp 47.008.000	0	Rp - 0	Rp - 3	Rp 28.726.800	20	Rp 15.273.000	23	Rp 43.999.800	76,67%	93,60%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	Laporan	Rp 8.353.483.401	39	Rp 1.013.156.433	51	Rp 1.316.379.385	25	Rp 1.148.238.615	35	Rp 4.555.242.320	150	Rp 8.033.016.753	100,00%	96,16%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	Rp 4.642.501.749	29	Rp 619.181.625	50	Rp 1.076.203.347	11	Rp 594.196.573	60	Rp 2.200.138.429	150	Rp 4.489.179.974	100,00%	96,71%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	0	Rp -	0	Rp -	0,00%	0,00%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100	Persen	Rp 799.846.800	Rp 18.680.000	Rp 68.420.400	Rp -	Rp 690.120.000	100,00%	Rp 777.220.400	100,00%	97,17%				
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12	Unit	Rp 799.846.800	0	Rp 18.680.000	5	Rp 68.420.400	0	Rp - 7	Rp 690.120.000	12	Rp 777.220.400	100,00%	97,17%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	Persen	Rp 33.731.554.200	Rp 1.889.813.745	Rp 3.617.148.757	Rp 5.905.889.067	Rp21.161.936.839	75,00%	Rp 32.574.788.408	75,00%	96,57%				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	1	Laporan	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	0	Rp -	0	Rp -	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Rp 2.392.876.000	3	Rp 612.881.145	3	Rp 574.258.997	3	Rp 547.368.911	3	Rp 642.169.980	12	Rp 2.376.679.033	100,00%	99,32%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Laporan	Rp 23.816.283.200	1	Rp 598.944.600	3	Rp 1.008.925.760	8	Rp 3.324.556.156	3	Rp17.805.924.859	15	Rp 22.738.351.375	100,00%	95,47%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Rp 7.522.395.000	3	Rp 677.988.000	3	Rp 2.033.964.000	3	Rp 2.033.964.000	3	Rp 2.713.842.000	12	Rp 7.459.758.000	100,00%	99,17%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	Rp 8.348.441.500	Rp 712.366.120	Rp 1.858.604.090	Rp 848.356.664	Rp 4.591.603.416	221,11%	Rp 8.010.930.290	221,11%	95,96%				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25	Unit	Rp 734.460.000	6	Rp 130.950.000	7	Rp 123.130.000	4	Rp 88.729.834	3	Rp 365.357.415	20	Rp 708.167.249	80,00%	96,42%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	Rp 1.554.155.000	2	Rp 190.586.020	4	Rp 503.920.140	6	Rp 208.613.180	17	Rp 570.078.506	29	Rp 1.473.197.846	483,33%	94,79%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	Rp 6.059.826.500	1	Rp 390.830.100	2	Rp 1.231.553.950	1	Rp 551.013.650	2	Rp 3.656.167.495	6	Rp 5.829.565.195	100,00%	96,20%

Facilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100	Persen	Rp 3.305.171.000	Rp 455.623.432	Rp 812.462.562	Rp 689.065.053	Rp 933.101.259	97,22%	Rp 2.890.252.306	97,22%	87,45%				
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	Rp 1.664.620.000	3	Rp 248.993.050	3	Rp 348.556.402	3	Rp 360.412.133	4	Rp 449.578.316	13	Rp 1.407.539.901	108,33%	84,56%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	Rp 1.277.981.000	3	Rp 114.015.477	3	Rp 309.693.150	3	Rp 279.152.920	3	Rp 431.402.943	12	Rp 1.134.264.490	100,00%	88,75%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	Paket	Rp 362.570.000	3	Rp 92.614.905	3	Rp 154.213.010	2	Rp 49.500.000	2	Rp 52.120.000	10	Rp 348.447.915	83,33%	96,11%
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Rp 5.376.346.758	Rp 750.193.393	Rp 925.740.514	Rp 1.009.884.629	Rp 2.451.504.822	100,00%	Rp 5.137.323.358	100,00%	95,55%				
Relaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	Persen	Rp 5.376.346.758	Rp 750.193.393	Rp 925.740.514	Rp 1.009.884.629	Rp 2.451.504.822	100,00%	Rp 5.137.323.358	100,00%	95,55%				
Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan	12	Laporan	Rp 2.408.976.300	3	Rp 372.201.199	3	Rp 417.889.870	3	Rp 520.933.978	3	Rp 880.397.658	12	Rp 2.191.422.705	100,00%	90,97%
Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan	36	Laporan	Rp 967.926.058	9	Rp 118.159.000	9	Rp 230.752.325	11	Rp 192.060.800	7	Rp 423.340.900	36	Rp 964.313.025	100,00%	99,63%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan	Rp 1.999.444.400	3	Rp 259.833.194	3	Rp 277.098.319	3	Rp 296.889.851	3	Rp 1.147.766.264	12	Rp 1.981.587.628	100,00%	99,11%
Bagian Perencanaan dan Keuangan				Rp 32.694.969.857	Rp 2.744.350.595	Rp 11.854.421.128	Rp 6.681.105.924	Rp 9.332.473.258	91,04%	Rp 30.612.350.905	91,04%	93,63%				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Jumlah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 331.355.980	Rp 51.313.442	Rp 45.591.420	Rp 90.679.199	Rp 134.660.274	100,00%	Rp 322.244.335	100,00%	97,25%				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	Rp 199.916.480	3	Rp 37.589.442	0	Rp 20.632.260	0	Rp 26.654.820	3	Rp 110.538.874	6	Rp 195.415.396	100,00%	97,75%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	Dokumen	Rp 65.471.500	0	Rp -	0	Rp 9.604.800	12	Rp 43.023.100	0	Rp 8.626.000	12	Rp 61.253.900	100,00%	93,56%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	Rp 65.968.000	1	Rp 13.724.000	1	Rp 15.354.360	0	Rp 21.001.279	3	Rp 15.495.400	5	Rp 65.575.039	100,00%	99,40%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen	Rp 30.616.432.047	Rp 2.575.468.793	Rp 11.651.549.148	Rp 6.459.858.365	Rp 8.473.331.181	100,00%	Rp 29.160.207.487	100,00%	95,24%				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2268	Org/Bulan	Rp 29.700.739.495	486	Rp 2.495.888.549	810	Rp 11.536.892.452	486	Rp 6.366.586.201	486	Rp 7.871.195.044	2268	Rp 28.270.562.246	100,00%	95,18%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	Rp 897.267.552	2	Rp 72.327.844	4	Rp 110.526.696	3	Rp 93.272.164	3	Rp 595.097.537	12	Rp 871.224.241	100,00%	97,10%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	Rp 18.425.000	0	Rp 7.252.400	1	Rp 4.130.000	0	Rp -	1	Rp 7.038.600	2	Rp 18.421.000	100,00%	99,98%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100	Persen	Rp 1.747.181.830	Rp 117.568.360	Rp 157.280.560	Rp 130.568.360	Rp 724.481.803	73,13%	Rp 1.129.899.083	73,13%	64,67%				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	Org/Bulan	Rp 242.440.250	6	Rp 35.568.360	10	Rp 59.280.560	6	Rp 35.568.360	6	Rp 36.649.161	28	Rp 167.066.441	100,00%	68,91%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10	Paket	Rp 702.631.580	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	8	Rp 350.786.000	8	Rp 350.786.000	80,00%	49,92%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	Orang	Rp 200.900.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 11.026.642	1	Rp 11.026.642	12,50%	5,49%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Org/Bulan	Rp 601.210.000	3	Rp 82.000.000	3	Rp 98.000.000	3	Rp 95.000.000	3	Rp 326.020.000	12	Rp 601.020.000	100,00%	99,97%